



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

EVALUASI KINERJA DIREKSI BUMN

Yosephus Mainake

Analisis Legislatif Ahli Muda
yosephus.mainake@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan kepada lebih dari 1.500 pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) dalam acara *Town Hall Danantara Indonesia 2025* yang diselenggarakan di Jakarta *Convention Center* pada 28 April 2025. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara melalui Danantara Indonesia secara transparan, profesional, dan berdasarkan prinsip tata kelola yang kuat. Danantara Indonesia dinilai memiliki peran strategis sebagai lembaga pengelola aset negara dan berpotensi besar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Apabila dikelola secara optimal, nilai kekayaan yang berada di bawah pengelolaan Danantara diperkirakan dapat mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat. Presiden menegaskan bahwa seluruh aset negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Selain itu, ditekankan perlunya transformasi budaya kerja di lingkungan BUMN dengan meninggalkan pola kerja lama yang tidak efisien dan tidak berintegritas. Untuk mendukung upaya tersebut, Presiden mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pimpinan BUMN, meliputi aspek integritas, kapabilitas, dan kinerja, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih profesional, bersih, dan akuntabel.

Arahan serupa kembali ditegaskan oleh Presiden dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Negara pada tanggal 29 April 2025. Beliau menekankan bahwa transformasi menyeluruh di lingkungan BUMN merupakan langkah strategis. Presiden berharap agar proses evaluasi total terhadap jajaran direksi BUMN dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berkelanjutan, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa seluruh BUMN mampu berperan sebagai institusi yang kuat, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan nasional. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek kinerja finansial, tetapi juga menyentuh dimensi integritas, kompetensi manajerial, serta orientasi terhadap pelayanan publik dan pencapaian tujuan strategis negara.

Senada dengan pernyataan Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, Menyampaikan bahwa evaluasi terhadap direksi BUMN merupakan bagian penting dari upaya penilaian menyeluruh guna memastikan BUMN mampu bertransformasi menjadi institusi yang kuat serta berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Dalam pertemuan tersebut, Beliau menjelaskan bahwa pembahasan mengenai kinerja BUMN turut mencakup harapan agar BUMN dapat menjadi unit usaha negara yang memiliki daya tahan tinggi, apalagi mengingat besarnya nilai penyertaan modal negara yang telah diberikan. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja para penyelenggara BUMN. Hal ini berlaku tidak hanya bagi BUMN secara umum, tetapi juga khususnya bagi entitas yang tergabung dalam Danantara. Menurutnya, BUMN yang berada dalam naungan Danantara diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pembangunan ekonomi nasional serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh menjadi langkah krusial dalam memastikan BUMN benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi dan pelayan kepentingan publik.

Presiden, secara tegas menyerahkan tugas evaluasi menyeluruh terhadap kinerja direksi BUMN kepada manajemen Danantara Indonesia sebagai lembaga pengelola kekayaan negara. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas kepemimpinan, integritas pribadi, serta pencapaian hasil kerja direksi dalam mengelola perusahaan negara, sekaligus menjadi dasar obyektif dalam pengambilan keputusan terkait rotasi, promosi, maupun pemberhentian. Dalam arahnya, ditekankan bahwa pelaksanaan evaluasi harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis pada prinsip-prinsip akuntabilitas yang ketat. Evaluasi tersebut mencakup tidak hanya aspek kinerja, tetapi juga menilai watak, akhlak, dan capaian prestasi masing-masing direksi. Apabila ditemukan direksi yang tidak berprestasi, malas, atau menyalahgunakan wewenang dan fasilitas, maka harus segera dilakukan pergantian. Meskipun demikian, Presiden mengingatkan bahwa proses pergantian direksi harus tetap dilaksanakan secara objektif dan profesional, dengan mengedepankan promosi dari internal atau merekrut profesional yang kompeten dari luar. Pemilihan direksi tidak boleh didasarkan pada suku, agama, ras, latar belakang, atau afiliasi politik. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa Danantara Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor kebangkitan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan Danantara harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Dengan mandat dan tanggung jawab barunya, Danantara diharapkan mampu memastikan bahwa jajaran kepemimpinan di lingkungan BUMN diisi oleh figur-figur yang tidak hanya kompeten dan berintegritas, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap visi pembangunan nasional.

Atensi DPR

Penunjukan Danantara sebagai pelaksana evaluasi kinerja BUMN ini sekaligus menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap lembaga tersebut untuk menjadi penggerak utama dalam reformasi BUMN. Presiden menyampaikan bahwa seluruh proses evaluasi harus difokuskan pada pencapaian hasil yang konkret dalam mendukung pembangunan nasional dan mendorong BUMN agar memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat. Dengan peran barunya ini, Danantara diharapkan dapat memastikan bahwa kepemimpinan di tubuh BUMN benar-benar diisi oleh individu-individu yang kompeten, berintegritas, serta memiliki visi yang selaras dengan tujuan strategis negara. Komisi VI DPR RI, dalam menjalankan fungsi pengawasan, perlu mengawasi evaluasi kinerja direksi BUMN yang dilakukan oleh Danantara Indonesia untuk memastikan bahwa proses evaluasi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan arahan Presiden. Komisi VI DPR RI juga siap mendampingi dan mengawasi jalannya evaluasi guna memastikan bahwa hasilnya dapat benar-benar berperan aktif dalam mendorong perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sumber

antaranews.com, 29 April 2025;
Kompas, 29 April 2025;
ksp.go.id 28 April 2025;
nasional.kontan.co.id. 28 April 2025;
setneg.go.id. 30 April 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making